

"KEDAULATAN RAKYAT"

KAMIS LEGI, 17 MARET 2016  
( 7 JUMADILAKIR 1949 )

# Korupsi, Kemiskinan dan Keberdayaan Umat

**I**RONIS. Di tengah keterpurukan bangsa yang ditandai kesenjangan dan pemerataan ekonomi yang timpang, dan angka kemiskinan yang masih tinggi, perilaku korupsi bukannya semakin mengempis, Tetapi justru semakin menggelembung pada setiap sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tidak mudah untuk menjelaskan hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Pasalnya, hubungan antara keduanya bukan bersifat 'langsung'. Meski demikian, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap sejumlah faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian, pada ujungnya akan melahirkan kemiskinan.

Studi Eric Chetwynd, Frances (2003) dalam bukunya *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature* mengungkap, bahwa korupsi tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan melalui tahapan terlebih dahulu mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi. Selain membatasi pertumbuhan ekonomi, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa korupsi juga meningkatkan kesenjangan pendapatan.

Lebih jauh kajian Johnston (2005), menegaskan bahwa negara-negara yang memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) tinggi sering kali menghadapi rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM). Ukuran IPM antara lain merujuk pada rendah/tingginya kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan kualitas hidup individu (UNDP). Rendahnya kualitas kesehatan, pendidikan dan hidup individu biasanya berada dalam sebuah narasi besar bernama kemiskinan.

Kemiskinan biasanya dipicu oleh dua racun korupsi : korupsi yang menghisap perekonomian dan korupsi yang melahirkan budaya menyimpang. Sehingga meminimalkan angka kemiskinan akibat korupsi bukan saja dengan pendekatan pemberantasan tindakan korupsi model KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun juga diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mencakup 2 (dua) hal penting;

## M Nurul Yamin

meningkatkan kapasitas perekonomian umat dan menumbuhkan etika keadaban publik sekaligus advokasi terhadap korupsi sebagai perilaku menyimpang.

### Keberdayaan Umat

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah menjadikan Alquran khususnya Surat Al-Ma'un sebagai basis nilai yang menginspirasi gerakan pemberdayaan masyarakat. Dalam Rakernas MPM pekan lalu diteguhkan bila teologi Al Ma'un sesungguhnya tidak hanya berbicara soal pemihakan terhadap kaum *mustad'afin*. Namun 'kaum pendusta agama' secara kontemporer harus dimaknai sebagai golongan dan tindakan yang menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan kaum papa. Golongan 'pendusta agama' ini dapat saja bersifat perseorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.

Gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh MPM Muhammadiyah menemukan bentuknya secara lebih kongkret dengan berbagai rintisan model pemberdayaan sekaligus membangun keberdayaan umat. Hal tersebut nampak dalam berbagai macam langkah praksis MPM Muhammadiyah yang berlandaskan pada jihad keberdayaan yang mencakup lima medan jihad. Yakni jihad menegakkan kedaulatan pangan, jihad memberdayakan industri kecil dan menengah, jihad memberdayakan komunitas miskin kota dan masyarakat pulau terluar, jihad memberdayakan kaum buruh dan nelayan, jihad memberdayakan kaum difabel.

### Revolusi Teologis

Dalam situasi korupsi sebagai

kejahatan *extraordinary*, maka mengacu *Filsafat Intellijen* karya Jendral TNI (Purn) Dr AM Hendropriyono ST SH MH, situasi demikian disebut sebagai *iustitium* atau 'gawat-darurat'. Situasi yang memunculkan paradigma *necessitas legem non habet* atau kedaruratan tidak mengenal hukum apa pun karena kedaruratan membuat hukumnya sendiri.

Dalam konteks demikian, maka dibutuhkan rekonstruksi baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak saja bersifat legal formal, struktural, tetapi juga kultural dan juga teologis keagamaan. Ketika korupsi tidak lagi dipandang sebagai dosa besar, maka korupsi di negeri ini sulit diberantas dengan tuntas.

Ketika kita melihat wajah yang ceria dengan senyum di bibir para tertuduh korupsi. Boleh jadi mereka memandang korupsi sebagai tindakan yang tidak termasuk dosa agama ataupun dosa sosial. Bila demikian, diperlukan revolusi teologis untuk mencegah perilaku korupsi. □ - c

**Dr M Nurul Yamin MSi,**  
Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
dan Dosen Pascasarjana UMY.